



PEMERINTAH  
KOTA KENDARI

# Rencana Strategis

2023-  
2016

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

#EfisienEfektifTransparanAkuntabel



# KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas HidayahNya dokumen Badan Keuangan dan Aset Kota Kendari Tahun 2023-2026 telah kami susun sebagai arah dan pedoman bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 4 Tahun kedepan. Penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari ini merupakan implementasi berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Desain program, kegiatan dan sub kegiatan dalam dokumen Renstra ini mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050/3708 Tahun 2020 sebagaimana yang telah diamanatkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik berupa data dan informasi dalam penyelesaian dokumen RENSTRA ini. Akhir kata semoga dokumen RENSTRA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari ini dapat memberikan informasi kepada *stakeholders* dan pihak-pihak terkait. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Kendari,                      Maret 2022  
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KOTA KENDARI



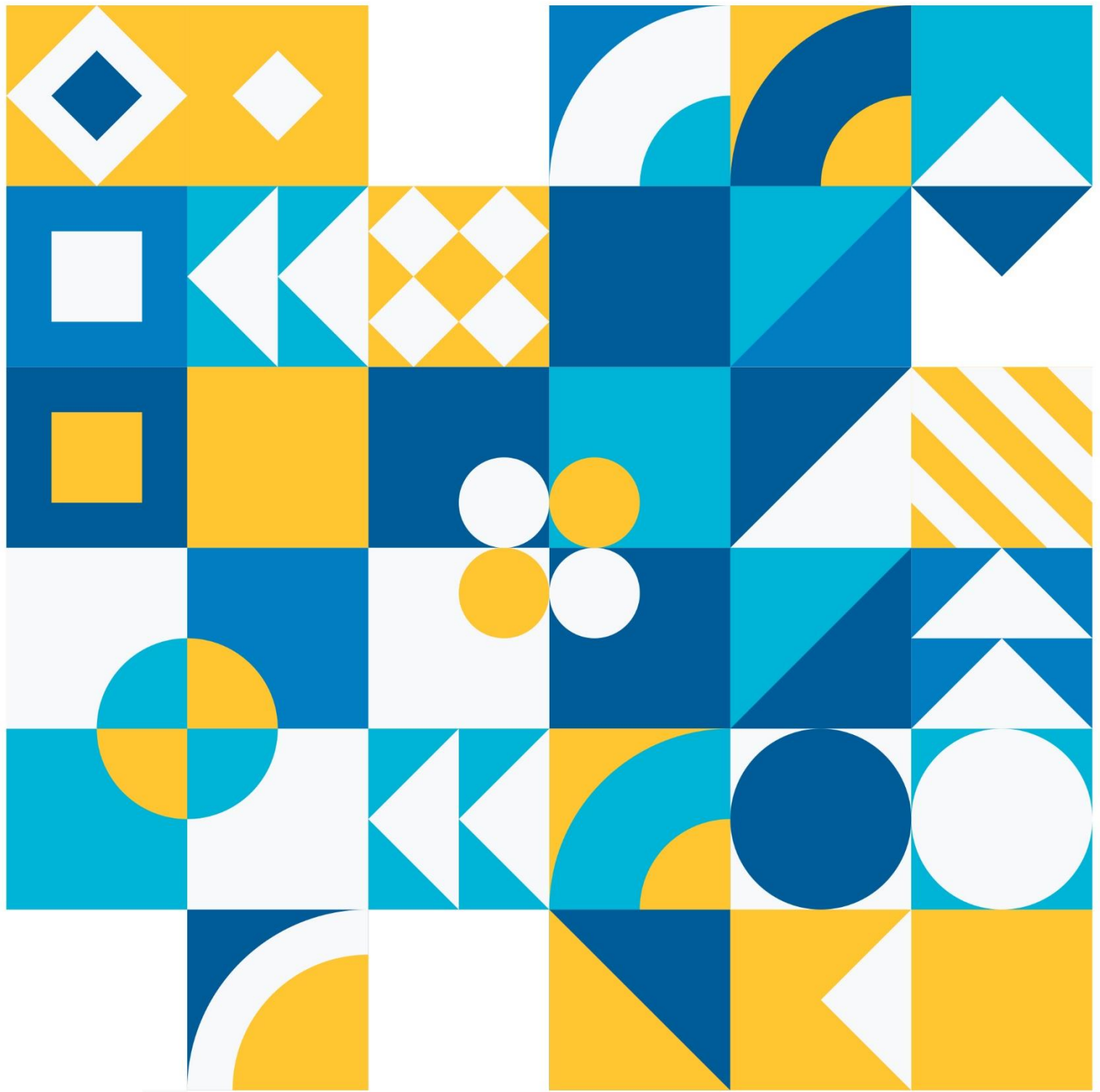
**Hj. FAUZIAH RACHMAN, SE.,M.Si**  
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c  
NIP. 19650407 199103 2 012



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1   Latar Belakang .....	1
1.2   Landasan Hukum .....	2
1.3   Maksud dan Tujuan .....	6
1.4   Sistematika Penulisan .....	7
 BAB II   GAMBARAN PELAYANAN BKAD KOTA KENDARI .....	 8
2.1   Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	8
2.2   Sumber Daya BKAD Kota Kendari .....	15
2.3   Kinerja Pelayanan BKAD Kota Kendari .....	17
2.4   Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKAD .....	22
 BAB III   PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	 24
3.1   Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari .....	24
3.2   Penentuan Isu-Isu Stratetgis .....	26
 BAB IV   TUJUAN DAN SASARAN .....	 27
 BAB V   STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	 30
 BAB VI   RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....	 32
 BAB VII   KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	 37
 BAB VII   PENUTUP .....	 38





# **BAB I**

## ***PENDAHULUAN***



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberi gambaran yang lebih jelas dan tegas tentang kewenangan daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat lokal menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dimaksud dilaksanakan dengan melalui prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan untuk menjawab permasalahan yang ada di daerah. Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 yang merupakan tindak lanjut terhadap amanat undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Daerah bahwa Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 – 2026, Serta

memerintahkan seluruh kepala perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026.

Sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut diatas, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kendari menyusun dokumen rencana strategis perangkat daerah (RENSTRA PD) yang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis pencapaian target kinerja. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari telah diamanatkan oleh Pemerintah Daerah Kota Kendari sebagai pembuat dan pengelola kebijakan disektor keuangan dan pengelolaan aset daerah. Dalam rangka melayani stakeholders serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai regulator dibidang kebijakan keuangan dan asset daerah, terdapat potensi dan permasalahan yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bab selanjutnya yang harus dipertimbangkan dalam proses penyusunan rencana strategis.

Proses penyusunan RENSTRA BKAD melalui 3 (tiga) alur penting sebagai model penerapan perencanaan komprehensif yaitu : (a) alur proses teknokratis-strategis, (b) alur proses partisipatif dan (c) alur proses politis legislasi., Ketiganya menjadi kerangka acuan bagi BKAD dalam merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta pagu indikatif untuk pencapaian Arah Kebijakan yang tertuang dalam Dokumen RPD Kota Kendari Tahun 2023 - 2026.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari Tahun 2023-2026 disusun dengan Landasan Hukum sebagai Berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855)
25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
26. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah yang Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022
32. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari 2010 – 2030;
33. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari.
34. Peraturan Daerah kota Kendari no 1 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari tahun 2005 – 2025.
35. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari.
36. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari
37. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari Tahun 2023 – 2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari ini dimaksudkan Sebagai dokumen perencanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memberikan arah kebijakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan Aset, arah kebijakan umum, program / kegiatan yang ingin dicapai selama 4 (Empat) tahun ke depan yaitu tahun 2023 sampai dengan 2026.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu untuk :

1. Menjabarkan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah di Kota Kendari selama 4 (Empat) tahun ke depan, kedalam perencanaan strategi Badan Keuangan dan Aset Daerah kota Kendari

2. Menemukan Strategi dan Kebijakan terhadap Keterkaitan visi dan misi serta Program Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah yang akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Renstra PD;
3. Memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah kota kendari untuk menentukan prioritas-prioritas utama dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga tujuan yang telah ditetapkan melalui dokumen RPD Kota Kendari tahun 2023 sampai dengan 2026 dapat tercapai secara optimal;

#### **1.4 Sistematika penulisan**

Renstra PD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari terdiri dari 8 (delapan) Bab dan masing-masing Bab menguraikan pokok-pokok bahasan dalam penulisan Rencana Strategi Perangkat Daerah sebagaimana berikut :

- Bab I : Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD, serta sistematika penulisan.
- Bab II : Berisi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber daya, Kinerja Pelayanan BKAD Kota Kendari serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.
- Bab III : Memuat Identifikasi permasalahan dan isu-isu daerah berdasarkan tugas dan fungsi Satuan kerja perangkat daerah.
- Bab IV : Memuat Penjabaran Tujuan dan Sasaran jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari sebagai wujud keterikatan didalam RPD Kota Kendari.
- Bab V : Berisi tentang Strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari untuk mewujudkan Visi Daerah.
- Bab VI : Berisi Rencana Program dan Kegiatan yang memuat indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 4 (Empat) tahun kedepan periode 2023-2026.
- Bab VII : Berisi Kinerja Perangkat daerah yang dirumuskan sebagai target dalam pengukuran capaian Renstra PD.
- Bab VII : Penutup.



# **BAB II**

## ***GAMBARAN PELAYANAN BKAD KOTA KENDARI***





## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KENDARI**

### **2.1 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 21 Tahun 2009 tentang struktur organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Kendari dan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari, yang kemudian diubah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari serta Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) berkedudukan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (PD) Kota Kendari yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari dan Peraturan Wali Kota Kendari nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari, berikut ini diuraikan tentang :

#### **A. Kedudukan**

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### **B. Tugas dan Fungsi**

Badan Keuangan dan Aset Daerah bertugas melaksanakan urusan pemerintahan yang melaksanakan Fungsi penunjang bidang Keuangan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- b. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
- c. Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD
- d. Perumusan Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Bidang Anggaran
- e. Penatausahaan Keuangan daerah
- f. Pengendalian Pelaksanaan APBD
- g. Penyusunan Keputusan Wali Kota tentang penetapan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas usul SKPD
- h. Penyimpanan uang Daerah selaku Bendahara Umum Daerah
- i. Penyusunan Laporan Keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan Fungsi Badan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki struktur organisasi jabatan yaitu :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Anggaran;
- d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- f. Bidang Aset; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing jabatan pada struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) adalah sebagai berikut:

## **I. Kepala Badan**

Kepala Badan bertugas memimpin, membina, mengordinasikan, mengawasi dan membina bawahan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis akrual serta menyelenggarakan fungsinya sebagaimana termuat dalam Tugas dan Fungsi Organisasi.

## **II. Sekretariat**

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris bertugas melaksanakan urusan administrasi umum, menyiapkan bahan koordinasi, kepegawaian, perencanaan, pengelolaan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan kantor, penyusunan program kerja, Evaluasi dan Pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya maka seorang Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengordinasian penyusunan rencana program dan anggaran berbasis akrual
2. Penyelenggaraan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai
3. Penyelenggaraan urusan umum meliputi kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, surat menyurat dan kearsipan
4. Penyusunan laporan akuntabilitas inerja instansi pemerintah
5. Penyusunan laporan keuangan berbasis Akrual
6. Penyusunan standar operasional prosedur
7. Perawatan barang inventaris dan perlengkapan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris dibantu oleh Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

### **1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pemeliharaan perlengkapan dan melaksanakan urusan pengelolaan kepegawaian dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugasnya. Sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan;

- b. penyelenggaraan urusan kesejahteraan dan kepangkatan pegawai;
- c. pelaksanaan kerumahtanggaan, perlengkapan dan keprotokolan;
- d. pelaksanaan peningkatan kinerja, disiplin dan perjanjian kinerja pegawai;
- e. Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD lingkup badan;
- f. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan keamanan kantor;
- g. pelaksanaan ketatalaksanaan BMD pengguna barang; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **III. Bidang Anggaran**

Bidang Anggaran bertugas melaksanakan koordinasi, verifikasi, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang anggaran, Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab terhadap kepala Badan.

Selain tugas-tugas sebagaimana diatas, Kepala bidang anggaran mennyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan, pedoman dan bimbingan teknis APBD;
2. Penyusunan kebijakan perencanaan dan evaluasi anggaran;
3. Penyusunan Pedoman dan petunjuk teknis bidang anggaran;
4. Penyusunan Rancangan APBD,~rancangan Perubahan APBD dan anggaran pembiayaan daerah;
5. Pelaksanaan verifikasi RKA/RKPA-SKPD/PPKD dan DPA/DPPA SKPD/PPKD;
6. Pengkordinasian pelaksanaan pengesahan DPA/DPPA-SKPD/PPKD perangkat daerah; dan
7. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional

### **IV. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah**

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan Koordinasi, Monitoring, Verifikasi, Evaluasi dan mengendalikan program teknis Perbendaharaan



Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang penerimaan, pengeluaran kas dan prosedur penatausahaan keuangan daerah;
2. Menyiapkan Anggaran Kas;
3. Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas;
4. Pengoordinasian dan pengendalian penempatan keuangan daerah, pengelolaan, penatausahaan Investasi dan Pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
5. Pengelolaan utang dan piutang dan melakukan penagihan piutang daerah
6. Pelaksanaan fungsi administrasi BUD/Kuasa BUD;
7. Pengoordinasian penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas daerah, laporan arus Arus Kas dan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran perhitungan Pihak ketiga;
8. Pengoordinasian pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/Pengembalian kelebihan penerimaan;
9. Pengendalian pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya;
10. Pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan perbendaharaan
11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tugas perbendaharaan;
12. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dibantu oleh tiga orang Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional.

## **V. Bidang Akuntansi dan Pelaporan**

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, monitoring, verifikasi, evaluasi dan mengendalikan program teknis pengelolaan akuntansi dan pelaporan berbasis akrual. Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan akuntansi dan pelaporan berbasis akrual;
2. Perumusan kebijakan, Pedoman dan bimbingan teknis di Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
3. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang akuntansi dan pelaporan;
4. Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis, sosialisasi dan penyelenggaraan sistem informasi dan teknologi informasi akuntansi;
6. pelaksanaan pembinaan teknis sistem akuntansi keuangan daerah;
7. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang akuntansi dan pelaporan;
9. penyiapan bahan penyelesaian permasalahan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR) keuangan dan barang milik daerah; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala bidang Akuntansi dan Pelaporan dibantu oleh tiga orang Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional.

## **VI. Bidang Aset**

Bidang Aset bertugas melaksanakan koordinasi, monitoring, verifikasi, evaluasi dan pengendalian pengelolaan aset daerah, yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang aset juga menyelenggarakan fungsi pengelolaan aset sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan aset daerah berbasis akrual;
2. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi pengelolaan aset daerah;
3. Penyiapan penyusunan dan penganalisaan rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
4. Penyusunan standar harga;
5. Penyusunan standarisasi sarana dan prasarana Pemerintah Daerah;
6. Penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah;

7. Penyusunan dan penyampaian laporan barang milik daerah;
8. Pelaksanaan penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah dan barang lainnya dari perolehan yang sah;
9. Penyusunan penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
10. Penyusunan pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Wali Kota dan/atau DPRD Kota Kendari sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
11. Pelaksanaan penatausahaan, inventarisasi dan penilaian barang daerah serta barang lainnya dari perolehan yang sah;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai tugas dan fungsinya.

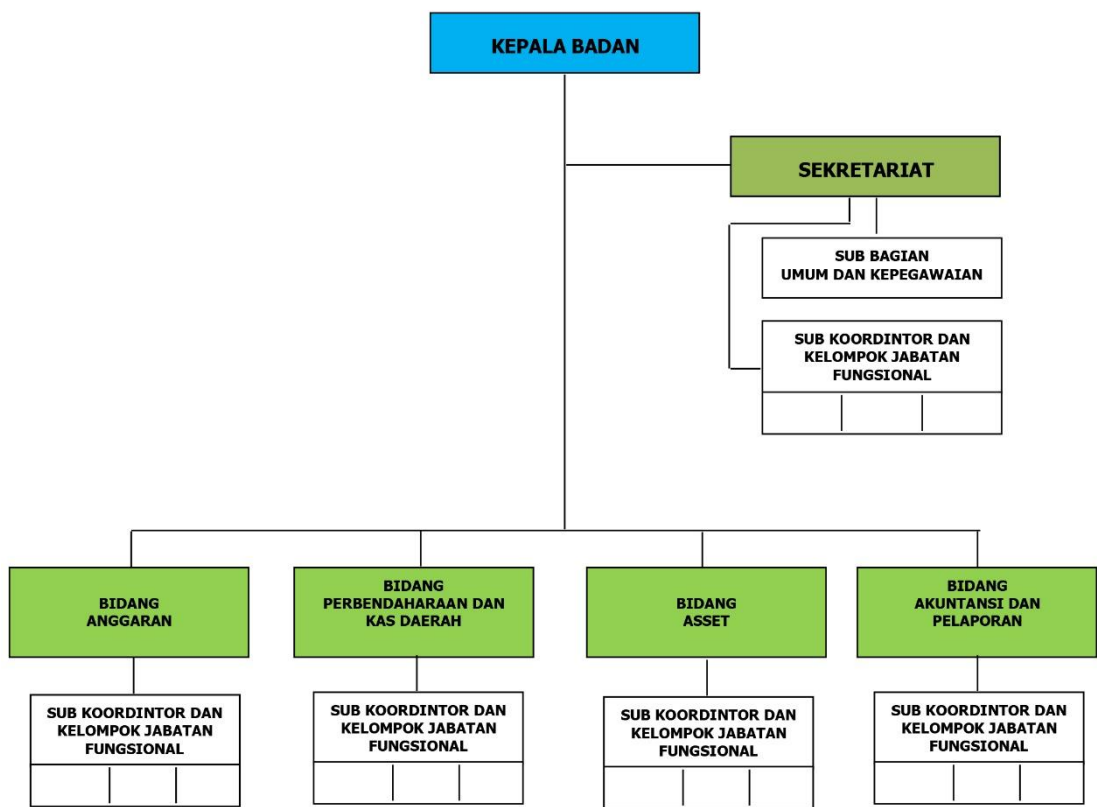
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala bidang Aset dibantu oleh tiga orang Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **VII. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah aparatur Sipil Negara yang terbagi dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok keahlian dengan tugas melaksanakan sebagian tugas teknis badan sesuai bidang keahliannya.

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya. Sub Koordinator membantu pimpinan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantuan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub substansi.

C. STRUKTUR ORGANISASI



2.2 Sumber Daya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari

Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari memiliki penunjang operasional berupa sumber daya berupa Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kendari memiliki Pegawai dari eselon II sampai pada staf dan tenaga kontrak termasuk sopir tercatat melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pertanggal 31 Desember 2021 berjumlah 148 (seratus empat puluh delapan) orang. Adapun uraian secara rinci Sumber Daya Manusia Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota kendari digambarkan melalui Tabel-tabel berikut ini.



**Tabel 2.1.**  
**Sumber Daya Manusia Badan Keuangan dan Aset Daerah menurut Jabatan dan Kepangkatan**

No	Jab. Struktural/ Tenaga Honorer	Pangkat/ Gol. Ruang	Jumlah Orang
1	Kepala Badan	Pembina, TK. I Gol. IV/c	1
2	Sekretaris	Pembina, TK. I Gol. IV/a	1
3	Kepala Bidang	Pembina, Gol. IV/a	2
4	Kepala Bidang	Penata Tk. I, Gol. III/d	2
	Kepala Sub Bagian	Penata Tk. I, Gol. III/d	2
5	Kepala Sub Bagian	Penata Tk. I, Gol. III/c	1
	Kepala Sub Bidang	Penata Tk. I, Gol. III/d	4
6	Staf PNS	Penata Gol, III/c	8
		Penata Tk. I, Gol. III/d	11
		Penata, Gol. III/c	18
		Penata Muda Tk. I, Gol III/b	17
		Penata Muda, Gol. III/a	11
		Pengatur Tk. I, Gol. II/d	5
		Pengatur, Gol. II/c	2
		Pengatur Muda Tk. I, Gol. II/b	3
		Honorer	60
7	Staf Honorer		
J U M L A H			148

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian BKAD Kota Kendari Tahun 202

**Tabel 2.2**  
**Sumber Daya Aparatur BKAD Menurut Komposisi Pegawai**

No	Komposisi Pegawai	Jumlah Orang
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	88
2.	Non Pegawai Negeri Sipil (Honorer/Kontrak)	60
J U M L A H		148

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian BKAD Kota Kendari Tahun 2021

**Tabel 2.3**  
**Sumber Daya Aparatur PNS BKAD Menurut Jenis Kelamin**

No.	Jenis kelamin	Jumlah Orang
1	Laki – Laki	42
2	Perempuan	46
J U M L A H		88

Sumber : Sub. Bagian Kepegawaian BKAD Kota Kendari Tahun 2021

**Tabel 2.4**  
**Sumber Daya Aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah**  
**menurut Jabatan**

No	Jabatan Struktural	Jabatan	Jumlah Orang
1.	Kepala Badan	Jabatan Tinggi Pratama	1
2.	Sekretaris	Jabatan Administrator	1
3.	Kepala Bidang	Jabatan Administrator	4
4.	Kepala Sub Bagian	Jabatan Pengawas	3
5.	Kepala Sub Bidang	Jabatan Pengawas	12
J U M L A H			21

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian BKAD Kota Kendari Tahun 2021

**Tabel 2.5**  
**Sumber Daya Aparatur PNS BKAD Menurut Tingkat Pendidikan**

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah Orang
1	S.2	16
2	S.1/D4	55
3	D3/Sederajat	5
4	SMA/Sederajat	12
J U M L A H		88

Sumber : Sub. Bagian Kepegawaian BKAD Kota Kendari Tahun 2021

**Tabel 2.6**  
**Sumber Daya Aparatur Pegawai Negeri Sipil BKAD**  
**menurut Diklat Penjenjangan**

No.	DIKLAT Penjenjangan	Jumlah Orang
1	DIKLAT PIM II	-
2	DIKLAT PIM III	2
3	DIKLAT PIM IV	7
J U M L A H		9

Sumber : Sub. Bagian Kepegawaian BKAD Kota Kendari Tahun 2021

Kesiapan dari sisi SDM yang ada saat ini memang masih jauh dari apa yang menjadi harapan, namun demikian kedepan menjadi salah satu prioritas perekrutan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki terutama dibidang pengelolaan keuangan daerah dan menguasai komputerisasi baik sebagai tenaga teknis, tenaga operator maupun sebagai desain guna terlaksananya pengelolaan keuangan yang lebih Profesional, Transparan dan Akuntabl.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari saat ini memiliki Sumber Daya Aparatur dari berbagai macam disiplin ilmu dan berbagai Alumni yang ada, akan tetapi dengan dinamika dan perkembangan pembangunan yang terus meningkat memerlukan penyesuaian-penyesuaian untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi sehingga terus diperlukan berbagai macam disiplin ilmu yang ada.

2.2.2 Sumber Daya Aset/Sarana dan Prasarana

Sumber daya Aset/Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari sampai dengan tahun 2021 masih jauh dari cukup dengan kondisi fisik yang tidak seratus persen optimal dalam pengoperasiannya disebabkan beberapa faktor antara lain umur barang, sehingga kedepan perlu penambahan guna menunjang tugas-tugas sehari-hari dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Secara umum Sumber daya Aset/Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari sampai dengan tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.7  
Sumber daya Aset Kendaraan Dinas/Operasional

No.	Nama barang	Total Unit	Kondisi		
			Baik	Rusak ringan	Rusak berat
1.	Kendaraan Roda Empat	9	9		
2.	Sepeda Motor	27	27		
JUMLAH TOTAL		36	9		

Sumber : KIB BKAD Kota Kendari Tahun 2021

Tabel 2.8  
Sumber daya Aset Peralatan Kantor

No.	Nama barang	Total Unit	Kondisi		
			Baik	Rusak ringan	Rusak berat
1	AC / Pendingin Udara	46			
2	TV / Monitor / Alat Pemadam Kebakaran / White Board / Alat Rumah Tangga Lainnya	18			
3	Peralatan Audio / Sound System	21			
4	Lemari	16			
5	Kamera / cctv / handy cam	18			

6	Kursi kerja / sofa	145			
7	Handy talk (ht) / gps / alat ukur	16			
8	Proyektor / scanner	14			
9	Meja kerja	55			
10	Mesin ketik / mesin absensi	3			
11	Papan pengumuman (plang aset)	725			
12	Peralatan jaringan lainnya	10			
13	Exhause / fan	6			
14	Brankas / kotak penyimpanan	2			
15	Server	7			
16	Komputer pc	102			
17	Laptop / notebook	49			
18	Printer	105			
19	Ups (unintemuptible power suplay)	14			
JUMLAH TOTAL		1371			

Sumber : KIB BKAD Kota Kendari Tahun 2021

Tabel 2.9

Sumber Daya Aset Lainnya berupa Sistem Informasi Manajemen/Aplikasi

No.	Uraian	Volume/Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) KEUANGAN	1 Paket	-	-
2.	Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMDA-BMD)	1 Paket	-	-
3.	Sistem Informasi Manajemen Aset Berbasis GIS (SIMSETGIS)	1 Paket	-	-
4.	Sistem Informasi Manajemen Pelayanan dan Pengarsipan SP2D	1 Paket	-	-
5.	OS Mesin Antrian	1 Paket	-	-
6.	SIMPEL ALIR	1 Paket	-	-
7.	E-Office	1 Paket	-	-

Sumber : KIB BKAD Kota Kendari Tahun 2021

### 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kendari dalam melaksanakan seluruh tugas-tugas dan fungsi organisasi dan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan Aset daerah tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan



prinsip-prinsip pengelolaan Anggaran yaitu Efisien, Efektif, Transparan dan Akuntabel.

Koordinasi dan konsultasi secara terintegrasi dan terstruktur menjadi dasar utama dalam melakukan pekerjaan dan tugas-tugas mulai dari Kepala Badan, Sekretaris, Para Kepala Bidang dan Kepala Sub. Bagian serta Kepala Sub. Bidang sampai kepada seluruh staf yang ada. Seluruh bawahan atau staf wajib bertanggungjawab atas tugas-tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dan menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh pimpinan.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari selain melaksanakan fungsi selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga selaku SKPKD yang melakukan fungsi Bendahara Daerah.

### **2.3.1 Evaluasi Pencapaian Kinerja Lima Tahun yang Lalu (2018-2022)**

Gambaran Capaian Kinerja Sasaran dan Realisasi Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari periode renstra 2018 sampai dengan 2021 (periode renstra sebelumnya) dituangkan dalam pengukuran Capaian indikator kinerja Utama dan Pengukuran Capaian Realisasi Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana table berikut:

**Tabel. 2.10**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Keuangan Dan Aset Daerah**

No	Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	On Progress	-	100,00	100,00	100,00	On Progress	-

**Tabel. 2.11**  
**Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah**

Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun Ke- (Dalam Ribuan)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Dalam Ribuan)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran (Rp)	Realisasi
Terlaksananya Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.156.450	2.248.850	1.641.482	1.196.260	1.360.359	1.847.065	1.980.038	1.282.219	1.132.036	On Progress	85,65	88,05	78,11	94,63	On Progress	(9,03)	(13,25)
Terlaksananya Cakupan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	739.904	980.950	885.305	2.512.981	1.146.671	674.141	922.975	883.731	2.241.464	On Progress	91,11	94,09	99,82	89,20	On Progress	38,08	62,10
Terlaksananya Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	121.680	103.200	-	-	-	121.500	On Progress	-	-	-	99,85	On Progress	42,41	100,00
Terlaksananya Cakupan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	273.275	435.000	17.300	244.320	281.690	184.221	356.564	-	221.064	On Progress	67,41	81,97	-	90,48	On Progress	322,68	31,18
Terlaksananya Cakupan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	838.950	1.120.250	470.561	419.101	388.842	664.773	840.839	455.309	352.041	On Progress	79,24	75,06	96,76	84,00	On Progress	(10,66)	(14,02)
Terlaksananya Cakupan Promosi Pembangunan Dan Informasi Daerah	30.000	30.000	-	25.000	25.000	29.999	29.992	-	-	On Progress	100,00	99,97	-	-	On Progress	25,00	(66,67)
Terlaksananya Cakupan Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.775.396	5.638.371	4.100.773	6.396.172	5.459.583	3.718.948	4.694.669	3.762.829	5.578.812	On Progress	77,88	83,26	91,76	87,22	On Progress	8,03	18,22
Terlaksananya Cakupan Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	2.576.485	1.654.840	930.607	1.844.800	2.100.871	1.377.857	1.185.515	821.633	1.505.641	On Progress	53,48	71,64	88,29	81,62	On Progress	8,15	12,87

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari**

Secara bahasa, pengertian tantangan adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk menggugah kemampuan, sedangkan peluang adalah kesempatan yang dapat menjadikan tujuan dapat terwujud. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari berdasarkan capaian kinerja yang ditargetkan pada rencana strategis periode sebelumnya telah melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran arah kebijakan dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah kota kendari. Berdasarkan analisa pencapaian kinerja tersebut diperoleh adanya beberapa target indikator kinerja yang belum maksimal tercapai, hal ini dipengaruhi oleh adanya factor internal maupun external dari pengelolaan dan pelaksanaan tugas fungsi Badan Keuangan dan Aset daerah kota kendari.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari mempunyai fungsi pelayanan ke dalam dan ke luar, artinya BKAD Kota Kendari disertai tugas untuk memberikan pelayanan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Kendari maupun kepada masyarakat (penyedia barang/jasa) yang melaksanakan penyediaan barang dan atau jasa pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Kendari. Berdasarkan kondisi tersebut maka, BKAD harus mampu mengoptimalkan bentuk usaha/kegiatan strategis dari kekuatan yang dimiliki melalui kemampuan menganalisa tantangan dan peluang yang ada.

Tantangan dan peluang yang dirasakan merupakan factor yang dapat mempengaruhi capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset daerah pada periode lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

### **A. Tantangan :**

1. Perubahan Peraturan yang sangat cepat mempengaruhi Kebijakan; Pemerintah Pusat maupun Daerah terhadap pemenuhan standar pelayanan maupun prosedur;
2. Pengawasan dan Pengendalian terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin meningkat
3. Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah yang harus dipertahankan

4. Kurangnya Kemampuan SDM yang memiliki kemampuan sebagai Pengelola Keuangan dan Aset di tingkat Perangkat Daerah sehingga kurang optimalnya pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5. Kurangnya SDM yang memiliki Kompetensi pendidikan yang berlatar belakang Akuntansi serta Informasi Teknologi

**B. Peluang :**

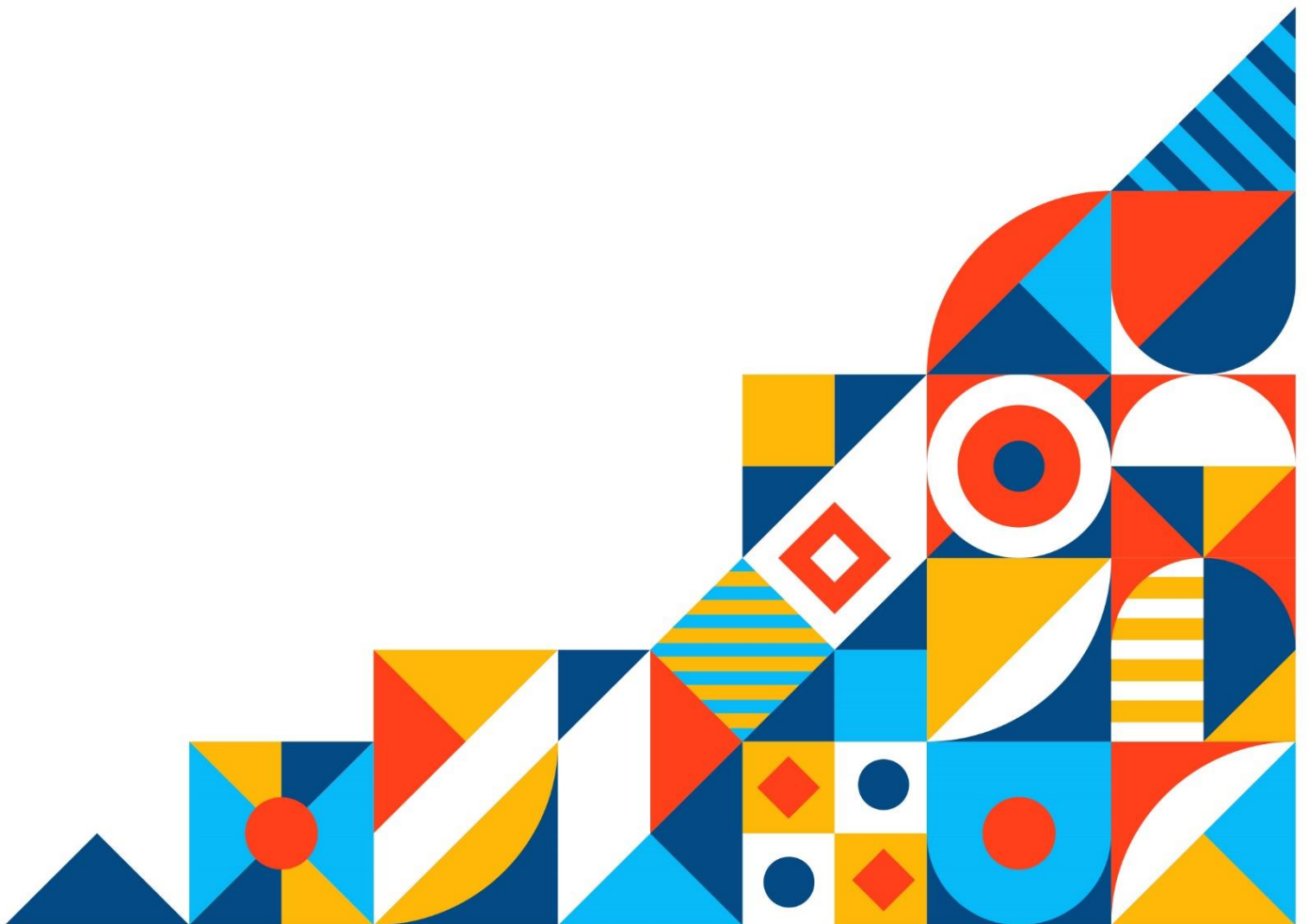
1. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung dan memberikan ruang terhadap pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Peningkatan sumber daya khususnya teknologi Informasi di Lingkup Pemerintahan yang semakin mutakhir
3. Hubungan kerja dengan instansi terkait, stakeholder maupun antara eksekutif dan legislatif terjalin dengan baik.
4. Dukungan Kepala Daerah tentang pengembangan Inovasi dalam mendukung Kelancaran Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota kendari.





# **BAB III**

## ***PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS***



## **BAB III**

# **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KENDARI**

Analisis Isu-Isu Strategis merupakan analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan baik bersifat umum maupun yang khusus. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Dalam uraiannya Isu isu strategis dibagi atas tiga bagian yaitu pembahasan tentang Permasalahan pembangunan, faktor penghambat dan pendorong permasalahan pembangunan daerah dan Isu-Isu Strategis yang diperoleh melalui identifikasi isu isu penting pemerintah kota Kendari yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari masih memiliki hambatan dan tantangan, namun tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan yang dilaksanakan, berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah kota Kendari.

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari.**

Rencana Strategi (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari Tahun 2023-2026 merupakan Dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan Dalam Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, Renstra BKAD ini diharapkan dapat mengakselerasi Tujuan pembangunan daerah Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota kendari memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan pemerintahan daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan Pelaporan dibidang Keuangan dan Aset yang terkait Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan serta pengelolaan dan Penatausahaan Aset/Objek Kekayaan Daerah

Kondisi ideal Pelayanan sektor Keuangan dan Aset yang diharapkan nantinya berdasarkan Tujuan yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kendari periode 2023 sampai dengan 2026 adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi**  
**Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1. Mempertahankan Kualitas Pengelolaan Keuangan terhadap Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	1. Kinerja Pengelolaan kegiatan dan realisasi anggaran rendah	1. Kualitas Sumber Daya Aparatur yang masih rendah 2. Kuantitas dan Kualitas Sarana Prasarana Pendukung Belum Memadai
	2. Proses/Tahapan Penyusunan Dokumen Penganggaran belum sepenuhnya sesuai peraturan perundang-undangan	1. Kualitas Dokumen Perencanaan Anggaran SKPD belum Sesuai Standar 2. Penyampaian RKA SKPD Tidak Tepat Waktu 3. Ketersediaan waktu antara legeslatif dan Eksekutif yang tidak sama
	3. Penyerapan Anggaran Belanja Belum Optmal	1. Rencana Anggaran Belanja yang ditetapkan tidak sejalan dengan Trend Pendapatan Daerah
	4. Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan belum Menampilkan data terkini	1. Penggunaan system informasi belum didukung dengan ketersediaan jaringan yang memadai 2. Rekonsiliasi Data Keuangan Belum Optimal 3. Pembinaan SDM Pengelola Laporan belum Optimal
	5. Pengawasan dan Pengelolaan Aset yang belum optimal ditingkat Perangkat daerah	1. Persebaran Aset yang cukup Luas 2. Informasi Letak/Keberadaan Aset yang belum memadai 3. Kurangnya Informasi Penanggung Jawab penggunaan Aset 4. Updating Informasi Aset yang masih rendah 5. Dokumen Kepemilikan Aset Belum Teradministrasi dengan baik ditingkat Perangkat Daerah

### **3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Analisis Isu-Isu Strategis adalah merupakan analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi baik bersifat umum maupun yang khusus. Telaahan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari kemudian dilakukan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal dalam merumuskan kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis, yaitu keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya.

Berdasarkan Analisa tersebut maka Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah kota Kendari dapat diuraikan yaitu,:

1. Kinerja Pengelolaan Anggaran dan Kegiatan yang masih rendah.
2. Belum Optimalnya Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan terhadap ketepatan waktu proses penyusunan dan penetapan APBD.
3. Belum Optimalnya Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Belum Optimalnya Pengawasan dan Pengelolaan Aset Daerah yang lebih komprehensif.





# **BAB IV**

## ***TUJUAN DAN SASARAN***



## BAB IV

# TUJUAN DAN SASARAN

Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal yang ingin dicapai, dihasilkan atau diwujudkan atau dengan kata lain ingin dijadikan suatu realitas antara keinginan dan kenyataan dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan sasara merupakan fokus/target spesifik dari suatu tujuan yang ingin dicapai, sasaran merupakan bagian integral dalam system perencanaan strategis yang dititik beratkan pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan indicator sasaran utama yang ingin dicapai dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kendari tahun 2023-2026 maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota kendari yang diamanah dalam melakukan Pengelolaan di bidang Keuangan dan Aset daerah merumuskan Tujuan dan Sasaran serta indikator yang memuat target-target capaian disetiap tahun pelaksanaannya. Adapun Tujuan, Sasaran serta Indikator yang akan ditargetkan dapat dilihat sebagaimana table berikut :



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Tahun 2023 samai dengan 2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian Pada Tahun Perencanaan Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun			
					2023	2024	2025	2026
1.	Tercapainya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel secara Wajar dan Berkualitas		Persentase Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel secara Wajar dan Berkualitas	100 %	100%	100%	100%	100%
		1. Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	1. Persentase Ketepatan Waktu Penyediaan Dokumen Penganggaran dan Pelaporan (KUA PPAS, APBD, DPA SKPD)	100 %	100,00%	100,00 %	100,00%	100,00 %
			2. Capaian Nilai Kecukupan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai SAP	73,35%	74,24%	75,50%	78,50%	90,00%



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian Pada Tahun Perencanaan Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun			
					2023	2024	2025	2026
		2. Meningkatnya Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah	1. Persentase Pelaksanaan Penanganan Aset Bermasalah pada Aset Lainnya	12,75%	14,92%	21,95%	30,42%	50,73%







# **BAB V**

## ***STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN***

## **BAB V**

# **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode tertentu, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana PD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari sebelumnya telah merumuskan isu-isu strategis yang kemudian dijadikan tujuan serta sasaran yang akan dicapai dalam periode 2023 s.d 2026.

Adapun Tujuan, Sasaran serta Strategi dan arah kebijakan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kendari dapat diuraikan sebagaimana termuat pada table berikut ini.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan,Sasaran dan Strategi Serta Arah Kebijakan**  
**Badan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Tahun 2023 s.d 2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Tercapainya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel secara Wajar dan Berkualitas	1. Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	1. Melaksanakan Aseistensi, Optimalisasi Verifikasi dan Validasi Dokumen Keuangan 2. Melaksanakan Rekonsiliasi data keuangan secara Berkala 3. Memanfaatkan dan Mengembangkan Sistem Informasi Teknologi	Meningkatkan Koordinasi dan Konsolidasi dengan Stakeholder  Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manuasia Pengelola Keuangan  Meningkatkan Inovasi Pengelolaan Keuangan berbasis Teknologi Informatika
	2. Meningkatnya Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah	1. Melakukan Penatausahaan Aset Secara Berkala 2. Melakukan Kerjasama dengan Stakeholder	Menetapkan Prosedur Pelaksanaan dan Pelopran Aset Daerah  Melaksanakan Pengelolaan Aset secara terpadu

# **BAB VI**

## ***RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN***





## **BAB VI**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program pada Organisasi Perangkat Daerah merupakan program prioritas Rencana Pembangunan Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pendanaan indikatif per OPD sebagaimana tercantum dalam Dokumen RPD, selanjutnya dijabarkan Oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Renstra BKAD Kota Kendari disusun dengan mengacu pada RPD Kota Kendari 2023 – 2026, dimana didalamnya disebutkan bahwa Tujuan Pembangunan Kota Kendari kedepan adalah Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang bersih dan Akuntabel dengan Indikator Sasaran adalah Opini BPK terhadap Hasil Pemeriksaan Laporan keuangan Daerah Pemerintah kota Kendari

Sebagaimana yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya telah dikemukakan sasaran-sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang dilakukan, maka berdasarkan hal-hal tersebut tercipta suatu indikator sasaran yang melahirkan suatu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari dalam periode 2023 sampai dengan 2026.

Berdasarkan hasil analisis terhadap arah kebijakan dan strategis untuk pencapaian tujuan maka dilahirkan suatu program dan kegiatan Prioritas sebagai eksekutor pelaksanaan pencapaian tujuan tersebut yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Adapun Uraian lengkap tentang Program, Kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang akan menjadi pengelolaan kinerja BKAD dapat dilihat pada jabarkan secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan  
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari  
Tahun 2023 sampai dengan 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc. (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun 2023(Dalam Ribuan)		Tahun 2024 (Dalam Ribuan)		Tahun 2025 (Dalam Ribuan)		Tahun 2026 (Dalam Ribuan)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		01.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				140.085.190.176		153.605.589.200		168.519.028.126		185.290.610.944		223.927.057.255		
Tercapainya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel secara Wajar dan Berkualitas	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	51.001.776.910	100 %	55.613.834.607	100 %	60.728.098.074	100 %	66.720.587.887	100 %	80.457.329.356	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	121.414.701	100 %	133.556.171	100 %	146.911.788	100 %	161.602.967	100 %	195.539.590	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	8.204.090	1 Dokumen	9.024.499	1 Dokumen	9.926.949	1 Dokumen	10.919.644	1 Dokumen	13.212.769	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	44.850.380	1 Dokumen	49.335.418	1 Dokumen	54.268.960	1 Dokumen	59.695.856	1 Dokumen	72.231.985	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	44.850.380	1 Dokumen	49.335.418	1 Dokumen	54.268.960	1 Dokumen	59.695.856	1 Dokumen	72.231.985	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.992.050	1 Dokumen	5.491.255	1 Dokumen	6.040.381	1 Dokumen	6.644.419	1 Dokumen	8.039.746	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.992.050	1 Dokumen	5.491.255	1 Dokumen	6.040.381	1 Dokumen	6.644.419	1 Dokumen	8.039.746	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	8.152.050	2 Laporan	8.967.255	2 Laporan	9.863.981	2 Laporan	10.850.379	2 Laporan	13.128.958	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	5.373.701	2 Laporan	5.911.071	2 Laporan	6.502.178	2 Laporan	7.152.396	2 Laporan	8.654.399	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	46.596.576.377	100 %	51.256.234.015	100 %	56.381.857.416	100 %	62.020.043.158	100 %	75.044.252.221	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	46.329.149.507	14 Bulan	50.962.064.458	14 Bulan	56.058.270.903	14 Bulan	61.664.097.994	14 Bulan	74.613.558.573	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	7.940.020	2 Laporan	8.734.022	2 Laporan	9.607.424	2 Laporan	10.568.167	2 Laporan	12.787.482	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	19 Laporan	259.486.850	19 Laporan	285.435.535	19 Laporan	313.979.089	19 Laporan	345.376.997	19 Laporan	417.906.167	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	501.199.940	100 %	506.199.940	100 %	523.699.940	100 %	505.749.940	100 %	519.725.440	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	103.199.940	1 Paket	103.199.940	1 Paket	103.199.940	1 Paket	103.199.940	1 Paket	103.199.940	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	27.500.000	1 Dokumen	30.250.000	1 Dokumen	33.275.000	1 Dokumen	40.262.750	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	27.500.000	1 Dokumen	30.250.000	1 Dokumen	33.275.000	1 Dokumen	40.262.750	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	7 Orang	84.000.000	7 Orang	84.000.000	8 Orang	96.000.000	8 Orang	96.000.000	8 Orang	96.000.000	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	22 Orang	264.000.000	22 Orang	264.000.000	22 Orang	264.000.000	20 Orang	240.000.000	20 Orang	240.000.000	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.183.042.220	100 %	1.301.346.442	100 %	1.431.481.086	100 %	1.574.629.195	100 %	1.905.301.326	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	50.500.000	1 Paket	55.550.000	1 Paket	61.105.000	1 Paket	67.215.500	1 Paket	81.330.755	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	70.051.770	1 Paket	77.056.947	1 Paket	84.762.642	1 Paket	93.238.906	1 Paket	112.819.076	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	81.482.130	1 Paket	89.630.343	1 Paket	98.593.377	1 Paket	108.452.715	1 Paket	131.227.785	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	89.995.000	4 Laporan	98.994.500	4 Laporan	108.893.950	4 Laporan	119.783.345	4 Laporan	144.937.847	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	600.550.000	4 Laporan	660.605.000	4 Laporan	726.665.500	4 Laporan	799.332.050	4 Laporan	967.191.781	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	290.463.320	1 Dokumen	319.509.652	1 Dokumen	351.460.617	1 Dokumen	386.606.679	1 Dokumen	467.794.081	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	1.400.000.000	100 %	1.087.500.000	100 %	801.250.000	100 %	891.375.000	100 %	941.313.750	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39 Unit	5 Unit	450.000.000	3 Unit	75.000.000	- Unit	-	3 Unit	75.000.000	3 Unit	75.000.000	BKAD	Kota Kendari

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc. (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun 2023(Dalam Ribuan)		Tahun 2024 (Dalam Ribuan)		Tahun 2025 (Dalam Ribuan)		Tahun 2026 (Dalam Ribuan)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeler	196 Unit	20 Unit	200.000.000	15 Unit	175.000.000	10 Unit	150.000.000	10 Unit	150.000.000	10 Unit	165.000.000	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	30 Unit	40 Unit	475.000.000	20 Unit	350.000.000	20 Unit	350.000.000	20 Unit	350.000.000	20 Unit	350.000.000	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	- Unit	- Unit	-	1 Unit	200.000.000	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	10 Unit	150.000.000	10 Unit	150.000.000	10 Unit	150.000.000	10 Unit	150.000.000	10 Unit	150.000.000	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Karitor atau Bangunan Lainnya	- Paket	1 Paket	125.000.000	1 Paket	137.500.000	1 Paket	151.250.000	1 Paket	166.375.000	1 Paket	201.313.750	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			214.111.517		235.522.669		259.074.936		284.982.429		344.828.739	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	187.111.517	12 Laporan	205.822.669	12 Laporan	226.404.936	12 Laporan	249.045.429	12 Laporan	301.344.969	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	27.000.000	12 Laporan	29.700.000	12 Laporan	32.670.000	12 Laporan	35.937.000	12 Laporan	43.483.770	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			985.432.155		1.093.475.371		1.183.822.908		1.282.205.198		1.506.368.290	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31 Unit	31 Unit	520.585.910	31 Unit	572.644.501	31 Unit	629.908.951	31 Unit	692.899.846	31 Unit	838.408.814	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebeler	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	- Unit	10 Unit	25.000.000	20 Unit	50.000.000	20 Unit	50.000.000	20 Unit	50.000.000	20 Unit	50.000.000	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			26.799.995		29.479.995		32.427.994		35.670.793		43.161.660	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	2 Unit	4 Unit	30.000.000	4 Unit	40.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	60.000.000	5 Unit	80.000.000	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	129.690.000	1 Unit	142.659.000	1 Unit	156.924.900	1 Unit	172.617.390	1 Unit	208.867.042	BKAD	Kota Kendari
		5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	53.356.250	1 Unit	58.691.875	1 Unit	64.561.063	1 Unit	71.017.169	1 Unit	85.930.774	BKAD	Kota Kendari
	Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kinerja Perencanaan, Penatausahaan dan Pelaporan keuangan Daerah	85 %	87 %	86.888.042.131	89 %	95.576.846.344	89 %	105.134.530.979	95 %	115.647.984.076	95 %	139.934.060.732	BKAD	Kota Kendari
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Capaian Penyusunan APBD Tepat Waktu	100 %	100 %	1.782.394.250	100 %	1.960.633.675	100 %	2.156.697.043	100 %	2.372.366.747	100 %	2.870.563.764	BKAD	Kota Kendari
		5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	46.210.050	1 Dokumen	50.831.055	1 Dokumen	55.914.161	1 Dokumen	61.505.577	1 Dokumen	74.421.748	BKAD	Kota Kendari
		5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	46.210.050	1 Dokumen	50.831.055	1 Dokumen	55.914.161	1 Dokumen	61.505.577	1 Dokumen	74.421.748	BKAD	Kota Kendari
		5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	44 Dokumen	44 Dokumen	31.095.000	44 Dokumen	34.204.500	44 Dokumen	37.624.950	44 Dokumen	41.387.445	44 Dokumen	50.078.808	BKAD	Kota Kendari
		5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	44 Dokumen	44 Dokumen	31.095.000	44 Dokumen	34.204.500	44 Dokumen	37.624.950	44 Dokumen	41.387.445	44 Dokumen	50.078.808	BKAD	Kota Kendari
		5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	44 Dokumen	44 Dokumen	31.821.250	44 Dokumen	35.003.375	44 Dokumen	38.503.713	44 Dokumen	42.354.084	44 Dokumen	51.248.441	BKAD	Kota Kendari
		5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	44 Dokumen	44 Dokumen	34.602.250	44 Dokumen	38.062.475	44 Dokumen	41.868.723	44 Dokumen	46.055.595	44 Dokumen	55.727.270	BKAD	Kota Kendari
		5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	848.590.330	1 Dokumen	933.449.363	1 Dokumen	1.026.794.299	1 Dokumen	1.129.473.729	1 Dokumen	1.366.663.212	BKAD	Kota Kendari
		5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	687.076.410	1 Dokumen	755.784.051	1 Dokumen	831.362.456	1 Dokumen	914.498.702	1 Dokumen	1.106.543.429	BKAD	Kota Kendari
		5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	12.221.010	1 Dokumen	13.443.111	1 Dokumen	14.787.422	1 Dokumen	16.266.164	1 Dokumen	19.682.059	BKAD	Kota Kendari
		5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	13.472.900	1 Dokumen	14.820.190	1 Dokumen	16.302.209	1 Dokumen	17.932.430	1 Dokumen	21.698.240	BKAD	Kota Kendari
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Cakupan Penyediaan Laporan Pengelolaan Kas Daerah Sesuai Perundangan	100 %	1	1.329.240.820	1	1.462.164.902	1	1.608.381.392	1	1.769.219.531	1	2.140.755.633	BKAD	Kota Kendari
		5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	462.405.600	4 Dokumen	508.646.160	4 Dokumen	559.510.776	4 Dokumen	615.461.854	4 Dokumen	744.708.843	BKAD	Kota Kendari
		5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	239.338.550	1 Dokumen	263.272.405	1 Dokumen	289.599.646	1 Dokumen	318.559.610	1 Dokumen	385.457.128	BKAD	Kota Kendari

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc. (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun 2023(Dalam Ribuan)		Tahun 2024 (Dalam Ribuan)		Tahun 2025 (Dalam Ribuan)		Tahun 2026 (Dalam Ribuan)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	36 Laporan	12 Laporan	627.496.670	12 Laporan	690.246.337	12 Laporan	759.270.971	12 Laporan	835.198.068	12 Laporan	1.010.589.662	BKAD	Kota Kendari
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan LKPD tepat Waktu	100 %	100 %	1.740.146.580	100 %	1.914.161.238	100 %	2.105.577.362	100 %	2.316.135.098	100 %	2.802.523.469	BKAD	Kota Kendari
		5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	24 Laporan	24 Laporan	166.436.640	24 Laporan	183.080.304	24 Laporan	201.388.334	24 Laporan	221.527.168	24 Laporan	268.047.873	BKAD	Kota Kendari
		5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen	4 Dokumen	37.680.450	4 Dokumen	41.448.495	4 Dokumen	45.593.345	4 Dokumen	50.152.679	4 Dokumen	60.684.742	BKAD	Kota Kendari
		5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	404.757.320	1 Laporan	445.233.052	1 Laporan	489.756.357	1 Laporan	538.731.993	1 Laporan	651.865.711	BKAD	Kota Kendari
		5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	894.822.520	1 Dokumen	984.304.772	1 Dokumen	1.082.735.249	1 Dokumen	1.191.008.774	1 Dokumen	1.441.120.617	BKAD	Kota Kendari
		5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	BKAD	Kota Kendari
		5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	112.039.950	1 Dokumen	123.243.945	1 Dokumen	135.568.340	1 Dokumen	149.125.173	1 Dokumen	180.441.460	BKAD	Kota Kendari
		5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	21.944.450	1 Dokumen	24.138.895	1 Dokumen	26.552.785	1 Dokumen	29.208.063	1 Dokumen	35.341.756	BKAD	Kota Kendari
		5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	14.170.700	1 Dokumen	15.587.770	1 Dokumen	17.146.547	1 Dokumen	18.861.202	1 Dokumen	22.822.054	BKAD	Kota Kendari
		5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	42 Orang	42 Orang	88.294.550	42 Orang	97.124.005	42 Orang	106.836.406	42 Orang	117.520.046	42 Orang	142.199.256	BKAD	Kota Kendari
		5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Analisis Investasi dan Dana Darurat	100 %	100 %	81.523.253.974	100 %	89.675.579.371	100 %	98.643.137.309	100 %	108.507.451.039	100 %	131.294.015.758	BKAD	Kota Kendari
		5.02.02.2.04.02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	3 Laporan	3 Laporan	94.794.380	3 Laporan	104.273.818	3 Laporan	114.701.200	3 Laporan	126.171.320	3 Laporan	152.667.297	BKAD	Kota Kendari
		5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	12 Laporan	81.428.459.594	12 Laporan	89.571.305.553	12 Laporan	98.528.436.109	12 Laporan	108.381.279.720	12 Laporan	131.141.348.461	BKAD	Kota Kendari
		5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan dan Implementasi Sistem Pemerintah Daerah	100 %	100 %	513.006.507	100 %	564.307.158	100 %	620.737.873	100 %	682.811.661	100 %	826.202.110	BKAD	Kota Kendari
		5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	230.442.507	1 Dokumen	253.486.758	1 Dokumen	278.835.433	1 Dokumen	306.718.977	1 Dokumen	371.129.962	BKAD	Kota Kendari
		5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	264 Orang	264 Orang	282.564.000	264 Orang	310.820.400	264 Orang	341.902.440	264 Orang	376.092.684	264 Orang	455.072.148	BKAD	Kota Kendari
	Meningkatnya Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	2.195.371.135	100 %	2.414.908.249	100 %	2.656.399.073	100 %	2.922.038.981	100 %	3.535.667.167	BKAD	Kota Kendari
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penyediaan Laporan Perencanaan, Penatausahaan, dan Tatakelola Aset	100 %	100 %	2.195.371.135	100 %	2.414.908.249	100 %	2.656.399.073	100 %	2.922.038.981	100 %	3.535.667.167	BKAD	Kota Kendari
		5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Tersedianya Standar Harga	1 Dokumen	4 Dokumen	238.454.780	4 Dokumen	262.300.258	4 Dokumen	288.530.284	4 Dokumen	317.383.312	4 Dokumen	384.033.808	BKAD	Kota Kendari
		5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	28.296.840	1 Dokumen	31.126.524	1 Dokumen	34.239.176	1 Dokumen	37.663.094	1 Dokumen	45.572.344	BKAD	Kota Kendari
		5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	28.301.250	1 Dokumen	31.131.375	1 Dokumen	34.244.513	1 Dokumen	37.668.964	1 Dokumen	45.579.446	BKAD	Kota Kendari
		5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	44.511.600	1 Dokumen	48.962.760	1 Dokumen	53.859.036	1 Dokumen	59.244.940	1 Dokumen	71.686.377	BKAD	Kota Kendari
		5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	12 Laporan	320.311.500	12 Laporan	352.342.650	12 Laporan	387.576.915	12 Laporan	426.334.607	12 Laporan	515.864.874	BKAD	Kota Kendari
		5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	556.071.750	1 Laporan	611.678.925	1 Laporan	672.846.818	1 Laporan	740.131.499	1 Laporan	895.559.114	BKAD	Kota Kendari
		5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	345.295.345	1 Laporan	379.824.880	1 Laporan	417.807.367	1 Laporan	459.588.104	1 Laporan	556.101.606	BKAD	Kota Kendari



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc. (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun 2023(Dalam Ribuan)		Tahun 2024 (Dalam Ribuan)		Tahun 2025 (Dalam Ribuan)		Tahun 2026 (Dalam Ribuan)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	87.000.000	1 Laporan	95.700.000	1 Laporan	105.270.000	1 Laporan	115.797.000	1 Laporan	140.114.370	BKAD	Kota Kendari
		5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	8.250.000	1 Laporan	9.075.000	1 Laporan	9.982.500	1 Laporan	12.078.825	BKAD	Kota Kendari
		5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	169.616.670	1 Dokumen	186.578.337	1 Dokumen	205.236.171	1 Dokumen	225.759.788	1 Dokumen	273.169.343	BKAD	Kota Kendari
		5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	11.873.550	4 Laporan	13.060.905	4 Laporan	14.366.996	4 Laporan	15.803.695	4 Laporan	19.122.471	BKAD	Kota Kendari
		5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	313.486.750	1 Laporan	344.835.425	1 Laporan	379.318.968	1 Laporan	417.250.864	1 Laporan	504.873.546	BKAD	Kota Kendari
		5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	42 Orang	42 Orang	44.651.100	42 Orang	49.116.210	42 Orang	54.027.831	42 Orang	59.430.614	42 Orang	71.911.043	BKAD	Kota Kendari



# BAB VII

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

## BAB VII

# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh kepala satuan perangkat kerja daerah. Tujuan dalam Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja utama (IKU) pada organisasi perangkat Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang termuat dalam RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026, maka indikator kinerja Utama Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari adalah sebagai berikut :

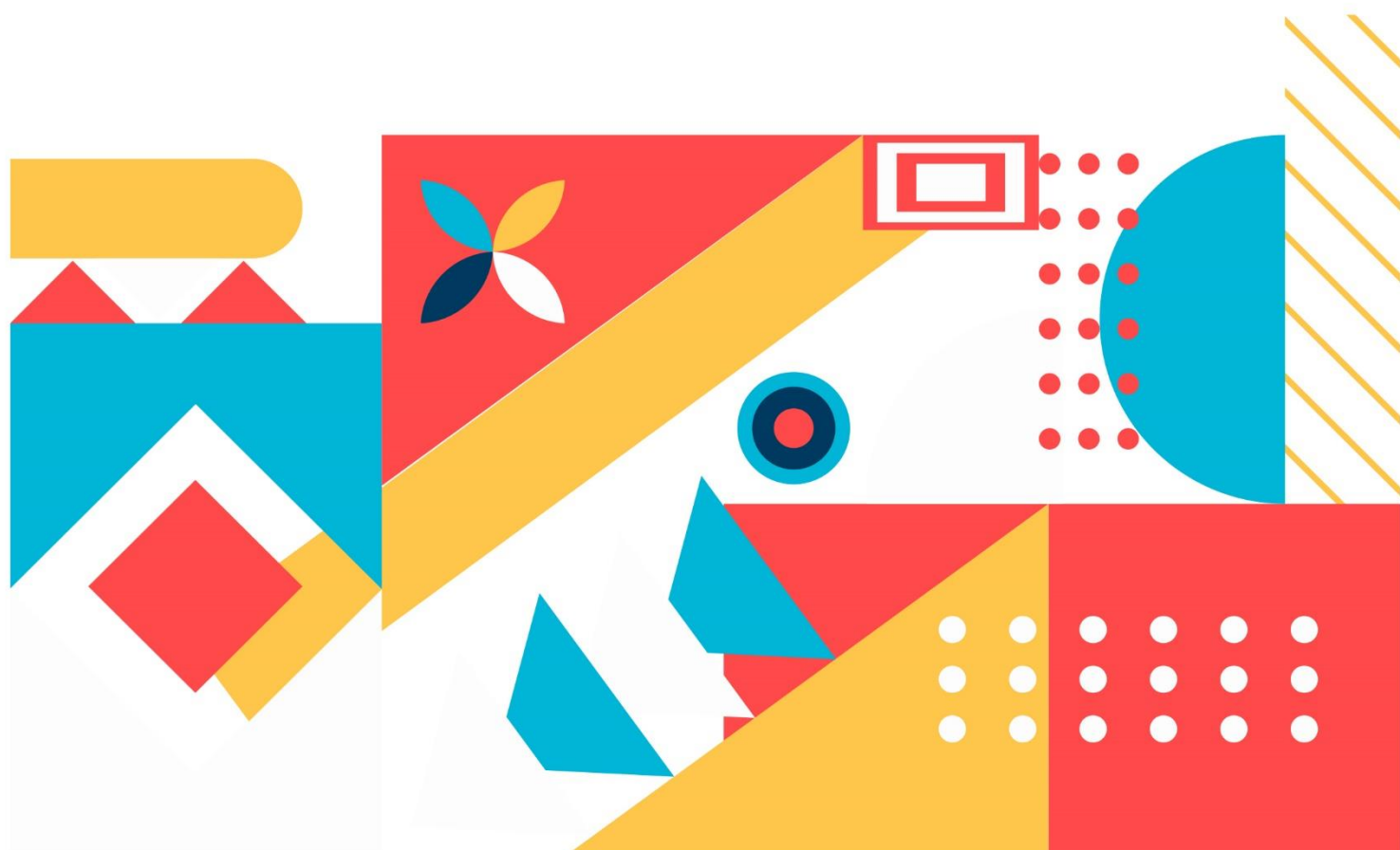
**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023 – 2026**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%



# BAB VIII

## *P E N U T U P*





## BAB VIII P E N U T U P

Rencana Strategis (RENSTRA) ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk periode 4 tahun mendatang yaitu tahun 2023-2026.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan peningkatan keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan tujuannya Daerah Kota Kendari yang telah disepakati dan dispesidikasi dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari tahun 2023 – 2026.

Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai..

Akhirnya komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian kinerja Renstra ini.

Kendari,           Maret 2022

KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KOTA KENDARI



**Hj. FAUZIAH A. RACHMAN, SE., M.Si**  
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c  
NIP. 19650407 199103 2 012